KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPENGARUHI STABILITAS HARGA TANDAN BUAH SEGAR DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Deki Suriadi
NIM. 170801090
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M / 1443 H

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIYAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Deki Suriadi
NIM	: 170801090
Program Studi	: Ilmu Politik
Nama Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar saya buat sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

62AAJX913204410

Deki Suriadi

NIM. 170801090

"KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPENGARUHI STABILITAS HARGA TANDAN BUAH SEGAR DI KABUPATEN NAGAN RAYA"

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

DEKI SURIADI

NIM. 170801090

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Thalal, Lc., M.S.,M.Ed	**Renaldi Safriansyah, SE.,M.HSc.,M.PM**
NIP. 197810162008011011	**NIDN.2007017903**

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPENGARUHI STABILITAS HARGA TANDAN BUAH SEGAR DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Muhammad Thalal, Lc., M.S., M.Ed	Renaldi Safriansyah, M.HSc.,M.PM
NIP.19781016200801101	NIDN.2007017903

Penguji I	Penguji II
Eka Januar, M.Soc.Sc	Melly Masni, M.I.R.
NIP.198401012015031003	NIP.199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mempengaruhi Stabilitas Harga Tandan Buah Segar Di Kabupaten Nagan Raya. Persoalan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit terus berlarut masyarakat merasa sangat dirugikan dengan keadaan pasar yang tidak memberikan jaminan kepada para petani. Pertanyaan Penelitian dalam skripsi ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan ketidakstabilan harga TBS di kabupaten Nagan Raya dan bagaimana upaya pemerintah dalam mempengaruhi stabilitas harga TBS di Kabupaten Nagan Raya. Tujuan penelitian adalah untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi harga TBS dan seberapa besar peran pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menstabilisasikan pasar TBS kelapa sawit untuk dapat membantu masyarakat di kabupaten Nagan Raya yang dimana kelapa sawit merupakan pendapatan utama masyarakat Nagan Raya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian banyak Faktor yang mempengaruhi harga TBS tidak stabil, diantaranya berjalannya pasar yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah sendiri dimana hal tersebut dilakukan oleh pihak PMKS, kemudian masalah transportasi yang masih tergolong jauh sehingga mempengaruhi distribusi dan kemudian jenis bibit kelapa sawit yang kurang baik juga menjadi faktor yang membuat harga TBS tidak stabil. Upaya pemerintah dalam menanggulangi harga TBS antara lain membuat transportasi laut untuk proses ekspor CPO di Kabupaten Nagan Raya, terus melakukan pemantauan terkait berjalannya pasar kelapa sawit dan memberikan surat peringatan terhadap agen-agen PMKS agar tidak mempermainkan harga pasar dan membagikan bibit unggul kepada masyarakat agar penanaman bibit TBS berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian dapat diketahui dari permasalahan harga TBS pemerintah telah melakukan beberapa upaya agar dapat menciptakan pasar yang lebih kondusif dan bermanfaat bagi petaninya.

Katakunci: ***Pemerintah, Kebijakan dan Kestabilan***

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahuwata'alla, karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “kebijakan pemerintah daerah dalam mempengaruhi stabilitas harga tandan buah segar di kabupaten nagan raya”. Skripsi ini peneliti ajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah *subhanahu wata’ala* kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad *shallallahu’alaihi wasallam* beserta segenap keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama peneliti menyelesaikan penelitian skripsi ini, peneliti banyak mengalami kendala serta hambatan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari ada begitu banyak kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga peneliti sangat membutuhkan kritikan serta saran yang membangun, agar peneliti bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. M.A, selaku rektor Uin Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku ketua prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A, selaku sekretaris prodi Ilmu Politik. Muji Mulia. M.A, selaku penasehat akademik dan beserta jajarannya.
4. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Thalal, Lc.,M.Si.,M.Ed selaku pembimbing I dan Renaldi Safriansyah, S.E.,M.HSc selaku pembimbing II yang terlah bersedia meluangkan

waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Terimakasih paling mendalam kepada kedua orang tua tercinta Ilyas.ZA dan Rosmanidar beserta keluarga besar yang telah mendoakan, menyemangat dan membantu baik dari segi materil maupun non materil.
6. Kepada saudara terkasih dan teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan masukan dan motivasi yang tidak henti-hentinya dari kalian menambah daya pacu semangat peneltii untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Informan dari penelitian ini yang sudah memberikan banyak informasi dan pengentahuan kepada peneliti selama proses penelitian ini berlangsug.
8. Segenap pihak yang telah hadir, membantu dan memberikan masukan serta kritik konstruktif kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penggarapan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Atas semua kebaikan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 14 Juli 2022
Peneliti,

Deki Suriadi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING..... **ii**
SURAT PENGESAHAN SIDANG..... **iii**
ABTRAKS ..... **iv**
KATA PENGANTAR..... **v**
DAFTAR ISI..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah..... 11
1.3. Tujuan Penelitian 11
1.4. Kajian Pustaka..... 12
1.5. Manfaat Penelitian 15

BAB II LANDASAN TEORI **17**
2.1.Teori Dari Tokoh-Tokoh Ekonomi 17
2.1.1. Adam smith (Invisible Hand)..... 17
2.1.2. Pemikiran Ekonomi Karl Marx 19
2.2.Teori Permintaan (Demand) dan Teori Penawaran (supply) 22
2.3.Teori Distributive Combine 25
2.4.Teori Kebijakan Publik 28

BAB III METODELOGI PENELITIAN **33**
3.1 Jenis Dan Lokasi Penelitian 33
3.2 Sumber Data..... 34
3.2.1. Data Primer 34
3.2.2. Data Sekunder 34
3.1. Metode Pengumpulan Data..... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN..... **37**
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya 37
4.1.1. Profil Kabupaten Nagan Raya..... 37
4.2. Faktor Penyebab Ketidakstabilan Harga TBS Di Kabupaten Nagan Raya 39
4.2.1. Kualitas Bibit Kelapa Sawit 39
4.2.2. Jarak Tempuh Untuk Transportasi CPO Masih Tergolong Jauh .. 43
4.2.3. Penentuan Harga Jual Yang Rendah Akibat Kualitas TBS Yang Minim Oleh PMKS 44
4.3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mempengaruhi Stabilitas Harga TBS..... 45
4.3.1. Revitalisasi Tanaman Kelapa Sawit..... 45
4.3.2 Pembangunan Pelabuhan CPO dan Sarana Pendukung 46
4.3.3. Pengawasan Oleh Disbun Kepada Pihak PMKS..... 52

BAB V PENUTUP..... 54
5.1 Kesimpulan..... 54
5.2 Saran..... 55
Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara produsen dan pengekspor CPO terbesar di dunia dengan volume sebanyak 43 juta ton[1] dan merupakan salah satu komoditi unggulan dimana CPO menjadi faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi semakin hari sawit menjadi tren pertanian yang semakin banyak dikembangkan karena begitu menjanjikan dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit namun hasil cukup mumpuni, pada tahun 2020 tecatat luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,858 juta hektare menurut data BPS[2], yang mencakup kebun inti dan juga kebun plasma. Oleh karena itu hal ini sangat patut untuk diperhatikan oleh pemerintah agar dapat menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Pemerintah dalam hal ini berusaha untuk menciptakan perlindungan terhadap para petani khususnya dalam hal ini kelapa sawit melalui peraturan Mentri Pertanian Nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS)[3] peraturan menteri tersebut merupakan kebijakan tepat yang di ambil oleh pemerintah untuk dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya sendiri, namun dalam prakteknya memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal lantaran kebijakan tersebut dari pusat, oleh karena itu pemerintah daerah harus ikut serta dan selalu mengawasi implementasinya.

---

[1]tim publish katadata.2019.negara-dengan-konsumsi-minyak-sawit-terbesar. https://databoks.katadata.co.id

[2]Badan Pusat Statistik Indonesia.www.bps.go.id

[3] Peraturan mentri pertanian NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018

Perekonomian merupakan unsur penting dalam negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan efek positif bagi negara dan tentunya akan berdampak positif pula pada kehidupan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang masyarakat akan semakin mudah meningkatkan kualitas kehidupan seperti di negara-negara yang sudah lebih maju. Dimana kita ketahui bahwa keadaan ekonomi di Indonesia memang masih sangat memprihatinkan, angka pengangguran dan kemiskinan yang masih begitu besar sehingga persoalan perekonomian ini kemudian akan melahirkan masalah-masalah lain dalam kehidupan negara.

Dalam upaya untuk peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik, setiap Individu ataupun anggota masyarakat tentu saja sangat bergantung pada peran pemerintah yang merupakan aktor pelaksana tugas negara dimana pemerintah memiliki wewenang untuk mengontrol setiap praktik ekonomi berjalan dengan semestinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan ini merupakan salah satu peran negara dalam perwujudan hak warga Negara yaitu kesejahteraan dan salah satu alat ukur kesejahteraan seorang atau sekelompok masyarakat adalah pendapatan, dimana pendapatan dapat menggambarkan perekonomian seseorang atau masyarakat tersebut dan juga untuk pengawasan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Pemerintah merupakan agen yang sangat penting dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Oleh karena itu pemerintah harus hadir untuk dapat menjamin bagaimana kesejahteraan itu dapat terealisasi dengan baik melalui agenda setting kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi, hingga kebijakan tersebut diimplementasi dengan baik dan di evaluasi dimana letak kekurangan dari kebijakan tersebut.[4] Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam dan sosial.

Nagan Raya merupakan kabupaten dengan keberadaan industri yang sangat baik dimana di Nagan Raya sendiri terdapat begitu banyak kekayaan alam dan salah satunya disini ialah kekayaan alam dari perkebunan kelapa sawit, kelapa sawit memiliki potensi besar dalam pergerakan perekonomian di kabupaten Nagan Raya pasalnya daerah itu terhampar lahan sawit yang begitu luas, pada masa pemerintahan Bupati pertama Nagan Raya H.T Zulkarnain, pihaknya telah membuat program sejuta sawit sejak tahun 2007 kemudian sempat terhenti dan dilanjutkan pada tahun 2015.[5] Perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya terus mengalami peningkatan, dalam acara penanaman atau peremajaan kelapa sawit di Nagan Raya Bupati H.M Jamin Idham dalam acara tersebut menjelaskan bahwasanya 1/3 daratan di Nagan Raya ditanami kelapa sawit, baik itu perkebunan masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 51 ribu ha maupun perkebunan perusahaan yang lebih kurang 78 ribu ha, dengan produksi rata-rata

[4] Nazaruddin.Kebijakan publik,jurusan ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,universitas malikussaleh

[5] Ridwan Saidi.2015.Kelapa Sawit Di Nagan Raya Menjanjikan. www.Infosawit.com

24 ton/ha. Dalam acara tersebut juga Bupati Nagan Raya menyampaikan harapan kedepannya bahwa TBS yang ada akan dapat diolah di Nagan Raya hingga menjadi barang jadi seperti minyak makan, sabun dan produk-produk kosmetik lainnya.[6] Tentu saja akan menjadi suatu keunggulan yang dapat menguntungkan masyarakat sendiri dan juga daerah tersebut jika sawit itu dapat diolah di dalam menjadi CPO (*cruide palm oil*) oleh karenanya semakin hari semakin banyak pula PMKS yang didirikan di Nagan Raya.

Saat ini kabupaten Nagan Raya memiliki PMKS terbanyak diantara kabupaten lain yang ada di Aceh. Hal itu terbukti dengan keberadaan 11 pabrik minyak kelapa sawit (PMKS).[7] Tak hanya dari sisi industri pertanian Nagan Raya juga memiliki industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan industri pertambangan yang belum dimanfaatkan dengan tepat. Kemudian yang menjadi persoalan-persoalan berkelanjutan yaitu tentang harga TBS dan juga efeknya kepada masyarakat sebagai rantai terakhir dari proses ekonomi industri dari kelapa sawit. Disisi lain juga kelapa sawit merupakan komoditas utama di kabupaten Nagan Raya paling besar luas lahan terdapat pada dua kecamatan di Nagan Raya yakni kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur sementara untuk kecamatan lain lebih banyak lahan milik perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini mejadi menarik untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait dengan fakta dan persoalan selama ini mengenai industri kelapa sawit agar dapat bermanfaat kedepannya.

---

[6]Humas dan Protokol SETDAKAB NR.2020.Pemkab Nagan Raya Lakukan Penanaman Perdana Kelapa Sawit Rakyat. https://naganrayakab.go.id

[7] Rizwan.2020.klarifikasi-harga-beli-tbs-disbun-nagan-raya-undang-11-pmks-ini-nama-nama-perusahaan-yang-hadir. https://aceh.tribunnews.com

Pemerintah Nagan Raya telah mengusulkan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan KIT (Kawasan Industri Terpadu) pada tahun 2019 dalam proses pengusulan KEK dan KIT pemerintah dibantu oleh 19 perusahaan yang ada di nagan raya.[8] Dimana kemudian hal itu sudah ditindak lanjuti oleh pemerintah aceh melalui Plt Gubernur Aceh yang mengirim surat kepada Kementrian koodinator bidang perekonomian dan Bappenas Republik Indonesia agar usulan tersebut nantinya dapat masuk ke dalam RPJM tahun 2019-2024, pemerintah aceh mengusulkan 3 daerah di barat selatan yang memiliki potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ketiga daerah tersebut ialah Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya.[9]

Sebagai kabupaten yang memiliki PMKS dengan jumlah yang cukup banyak di Aceh, hal ini pasti akan membuat persaingan pasar jauh semakin ketat dan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya, karna strategi untuk menarik perhatian para petani atau agen TBS salah satunya ialah dengan harga yang tinggi, namun jika tidak menggunakan strategi pasar seperti ini PMKS yang tidak memiliki kebun sendiri pasti akan mengalami kerugian lantaran kekurangan bahan untuk pengolahan dan juga hal terburuknya perusahaan akan mengalami defisit jika dalam waktu berkepanjangan mengalami hal semacam ini. Namun, banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan praktek perdagangan atau pasar TBS di kabupaten Nagan Raya seperti tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah lantaran persoalan harga TBS di Nagan Raya hampir sama rata di

[8] rizwan.2019.Bupati Berharap KEK-KIT Terwujud Di Nagan Raya. http://aceh.tribunnews.com

[9] Humasaceh,2019.Aceh Usulkan 3 kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Barat Selatan. bappeda.acehprov.go.id

semua PMKS yang ada di daerah tersebut hal ini tentu menjadi persoalan yang serius bagi masyarakatnya terlebih menurut masyarakat di daerah dua kecamatan yaitu Darul Makmur dan Tripa Makmur disaat hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari raya idul adha dimana disaat masyarakat banyak membutuhkan keperluan untuk perayaan hari-hari besar tersebut justru harganya turun sehingga mengakibatkan masyarakatnya merasa dirugikan karna pasar terkesan seperti dimanfaatkan oleh pengusaha. Permasalahan yang berkelanjutan ini tak kunjung mendapat penyelesaian secara kongkrit padahal di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2018 sudah dijelaskan terkait landasan memberikan klasifikasi harga tetap pembelian tandan buah segar kelapa sawit hasil dari produksi kebun. Dengan berlakunya peraturan menteri pertanian yang memberikan penjelasan tentang penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun.[10] Hal tersebut telah ditetapkan sebagai landasan hukum untuk menjalankan proses jual beli TBS ini.

Seiring berjalannya waktu adanya perkembangan harga pembelian tandan buah segar produksi kebun dan juga perubahan organisasi Kementerian pertanian dalam upaya melakukan pembinaan tim penetapan harga dan buah segar maka hal tersebut bisa dilihat dari peraturan menteri pertanian tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi perkebun mulai dewasa ini dirasa sudah tidak sesuai lagi. Peraturan menteri ini dimaksudkan untuk

[10] Peraturan Menteri Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS).

landasan dasar dalam pelaksanaan penetapan harga Tanda Buah Segar yang merupakan produksi pekebun.[11]

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat antara perusahaan perkebunan. Pada Pasal 4 ayat (1) Perusahaan perkebunan membeli TBS produksi pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama tertulis yang diketahui oleh Bupati/Wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangan; Pada pasal 4 ayat (4) Kepala daerah yang dalam pasal ini disebutkan Gubernur atau Bupati atau Wali Kota mengetahui suatu perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dan memberikan maksud sesuai kaidah ayat (1). Untuk pelaksanaan aturan ini, maka kepala daerah dapat memandatkan hal tersebut kepada dinas terkait. Kemudian pasal 5 dijelaskan bahwa ada tanggung jawab kepada daerah untuk memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pekebun yang berasal dari suatu daerah yang memiliki hamparan areal kelapa sawit. Pada pasal 6 ayat (1) harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan oleh gubernur; Pasal 6 ayat (2) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar.

Pada Pasal 6 ayat (3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur :

a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

[11] Peraturan Menteri Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pasal 2 ayat (1).

b. Pabrik atau perusahaan yang begerak di bidang perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit.

c. Perwakilan pekebun, dalam hal ini meliputi lembaga pekebun dan asosiasi petani kelapa sawit.

Praktek pasar yang cenderung mengakibatkan petani di Nagan Raya merugi dimana PMKS yang ada di daerah ini jarang bisa mengimbangi harga beli PMKS diluar Nagan Raya seperti contohnya di Subulussalam, Aceh Jaya ataupun Aceh Singkil dimana harga disana lebih baik dibandingkan Nagan Raya. Pada tahun 2019 sempat terjadi aksi unjuk rasa dari masyarakat Darul Makmur dan Tripa Makmur yang mana kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki lahan paling luas di antara 10 kecamatan di Nagan Raya terutama lahan milik masyarakat, karna tak ada langkah pasti dari pemerintah terkait permasalahan tersebut akhirnya jalan unjuk rasa menjadi solusi untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah Nagan Raya berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya harga beli TBS dari PMKS merupakan pengaruh dari pasar global.

Hal ini juga diperkuat oleh ketua SPSI Jamaludin, dia menilai aksi unjuk rasa masyarakat salah alamat, menurutnya PKS selama ini dalam menampung harga beli TBS kelapa sawit hanyalah sebagai unit bisnis yang sepenuhnya membeli harga TBS milik petani sesuai dengan harga minyak dunia, ia juga membantah tudingan masyarakat petani yang berasal dari kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur, Jamaludin membantah lantaran PKS selama ini jauh

dari praktik monopoli pasar dan tidak bisa sesukanya mengendalikan harga pasar.[12]

Hal tersebut merugikan masyakarat ekonomi menengah kebawah lantaran hanya memiliki kebun sedikit, kemudian biaya perawatan kebun sangat tinggi dan harga panen juga demikian, Sopir mobil kelapa sawit dan kebanyakan masyarakat baik dari Nagan Raya sendiri ataupun masyarakat dari Abdya yang membawa TBS ke Nagan Raya menganggap hal ini merupakan permainan pasar yang dilakukan oleh perusahaan lantaran pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten tersebut tidak serius dalam menangani persoalan tersebut, banyak dari toke sawit ataupun petani yang memiliki TBS lumayan banyak lebih memilih membawa TBS ke Subulussalam karna perbedaan harga yang begitu jauh. Dengan semakin banyaknya isu-isu permainan pasar yang dilayangkan di media tentu saja menarik perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, kemudian menindak lanjuti persoalan ini agar bisa mendapat titik temu. Hingga sejauh ini belum ada sebuah keputusan yang bisa kita dapat dari usaha tersebut, Namun DPRK Nagan Raya kedepan akan kembali mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan ini.

Kemudian berlanjut ke tingkat DPRA, wakil rakyat dari fraksi Partai Aceh Tarmizi, SP meminta agar dinas pertanian dan perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh untuk membentuk Tim khusus untuk mengusut dugaan permainan harga TBS sawit di Nagan Raya dan sekitarnya yang membeli harga TBS sawit dengan

[12] Mujiburrahman.2019.Harga Buah Sawit Turun,Petani Kelapa Sawit Demo Ke PKS Nagan Raya.https://mediarealitas-com

harga murah dan tidak sesuai ketetapan pemerintah Aceh.[13] Pembelian TBS milik petani sawit di Kabupaten Nagan Raya, provinsi Aceh terindikasi melanggar peraturan menteri pertanian nomor 1 tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penetapan harga beli tandan buah segar kelapa sawit produksi petani.[14] Penetapan harga pembelian TBS di daerah kabupaten Nagan Raya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang sebenarnya telah menetapkan harga jual beli TBS sudah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari dapil 10 yang merupakan warga Kabupaten Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan memiliki pandangan bahwa saat ini para petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya mengalami masalah yang rumit dan juga besar lantaran harga beli TBS di daerah tersebut belum sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang pada setiap bulannya pemerintah provinsi Aceh melalui distanbun mengeluarkan penetapan harga beli TBS. Penetapan harga TBS ini padahal sudah merupakan intruksi Provinsi yang seyogyanya harus di ikuti. Anngota DPRA fraksi Golkar ini juga menduga ada kejanggalan terhadap fenomena harga beli TBS di Nagan Raya mengingat PMKS yang ada di kabupaten tetangga seperti Aceh Barat dan Aceh Jaya berada di atas harga beli PMKS yang ada di Nagan Raya. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan pada pada bulan juni, harga TBS yang ada di Nagan Raya berada pada kisaran Rp1.050 per kilogram sampai dengan Rp1.080 per kilogram, sedangkan ketetapan harga pemerintah Aceh

[13]Sadhali.2021.Anggota DPRA Minta Distanbun Bentuk Tim Khusus Terkait Adanya Permainan Harga TBS. https://m.rri.co.id

[14] Permentan No.1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar

periode minggu kedua bulan juni hingga minggu pertama bulan juli tahun 2020 harga TBS untuk wilayah barat Aceh adalah sebesar Rp1.280 per kilogram[15].

Dari banyaknya keluhan mengenai harga TBS tentunya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap hal tersebut karna harga TBS merupakan turunan dari hasil perkalian CPO (*Cruide Palm Oil*) dimana disaat harga CPO naik maka harga TBS (Tandan Buah Segar) juga akan ikut serta naik, begitu juga sebaliknya.dari beberapa media pemberitaan terkait dengan harga TBS ada yang beranggapan bahwasanya ada campur tangan pemerintah dalam memonopoli pasar di kabupaten Nagan Raya. Kepala Dinas perkebunan dan pertanian Nagan Raya meminta setiap perusahaan PMKS yang ada di Nagan Raya melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan pemerintah.[16] Oleh karena itu peneliti tertarik untuk dapat melihat peranan pemerintah terkait permasalahan harga TBS di Nagan Raya yang sampai saat ini masih mejadi perhatian.

Dari uraian latar belakaang di atas,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mempengaruhi Stabilitas Harga Tandan Buah Segar Di Kabupaten Nagan Raya".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

[15] Iskandar.2020.Pembelian TBS Kelapa Sawit di Nagan Raya Aceh diduga Langgar Permentan. https://m.antaranews.com

[16]Antara.2021.Pabrik Minyak Kelapa Sawit Diminta Beli TBS Sawit Sesuai Harga Resmi. https://www.medcom.id

1. Apa saja faktor penyebab ketidakstabilan harga TBS di Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana upaya pemerintah mempengaruhi kestabilan harga TBS di Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan peneltian. Demikian pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mengakibatkan harga TBS tidak stabil.
2. Untuk melihat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mempengaruhi stabilitas harga.

1.4. Kajian Pustaka

Penelitian milik matodang dimana metode penelitian yang dilakukan di 24 perusahaan yang berada di Sumatera Utara,metode yang digunakan adalah FSCN (*Food Supply Chain Networking*) dengan pendekatan struktur rantai pasok, manajemen rantai pasok, proses bisnis rantai pasok dan sumber daya rantai pasok. Sistem rantai pasok diawali dengan pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) di kebun kelapa sawit yang dibawa ke pabrik untuk proses pengolahan menjadi minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*). Selanjutnya, produk dibawa ke pelabuhan untuk diekspor ke negara-negara pengimpor CPO melalui jalur laut. Model rantai pasok CPO terdiri atas panen (TBSyang berasal dari unit usaha, kebun besar, dan perkebunan milik masyarakat), produksi untuk mengolah tandan buah segar menjadi minyak mentah Cruide Palm Oil dan inti kelapa sawit yang

seperti buah kelapa namun memiliki dagin yang keras, persediaan (pengumpulan minyak sawit di pabrik dan juga di pelabuhan) dan distribusi.[17]

Rantai pasok di atas sudah menjelaskan sebagian proses pengolahan CPO dimulai dari petani yaitu pengumpulan TBS sebagian ada yang ditampung oleh pengepul atau agen kemudian dibawa ketimbangan dan lanjut kemudian dibawa kepabrik hingga selanjutnya menjadi minyak mentah atau CPO. Alamsyah dkk **"**Faktor-faktor yang mempengaruhi harga TBS petani sawit swadaya di provinsi jambi" setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data bahwa secara berbarengan semua proses yang digunakan berpengaruh secara perlahan tapi pasti terhadap harga TBS, pemilihan penggunaan pupuk, kualitas sumber daya manusia yaitu petani dan pemilihan bibit, namun dalam penelitian ini juga mendapat kesimpulan bahwasanya ada perbedaan harga antara TBS swadaya dan TBS Plasma atau bisa dikatakan adanya pembedaan perlakuan terhadap harga.[18]

Hidayatullah**,** ***"Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar"*** fokus pada penelitian lebih kepada perbandingan pasar dan pemikiran tokoh adam smith serta peranan pemerintah dalam pasar. Kondisi Pada prakteknya perekonomian pasar seringkali terlilit monopoli, seiring dengan melonjaknya inflasi dan pengangguran, pada praktek perdagangan atau distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat tidak stabil. Untuk mengatasi kelemahan mekanisme pasar itu, banyak Negara menerapkan *visible hand* (tangan Nampak) yang artinya peran

---

[17] Nazaruddin Matodang dan Irwan Budiman, *Conference Series:*Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Pada Produk Minyak kelapa sawit, TALENTA. 2019. Vol:2,Issue 4.

[18] Zulkifli Alamsyah,Dompak Napitupulu,dkk. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga TBS petani sawit swadaya di provinsi jambi ,JISEB. 2019. Vol.22 No.2 hal:101-112

serta pemerintah untuk mengawasi proses berjalannya ekonomi pasar, untuk mendampingi tangan yang tidak terlihat yang terdapat di dalam pasar.

Ada dua konsep akademis dalam memahami makro ekonomi, salah satu pandangan intelektual tersebut memberi pendapat bahwa konsep pasar yang paling baik adalah pasar yang memang dapat terbebas dari intervensi pemerintah, sedangkan pendapat kedua memberi gambaran bahwa intervensi pemerintah akan ikut membantu prosedur dalam proses upaya mengatasi ekonomi di dalam keadaan pasar. Kalau tidak ada upaya campur tangan dari pemerintah saat melakukan kontrol ataupun mengawasi jalannya perekonomian maka pasar yang tercipta adalah pasar dengan konsep sendiri-sendiri tanpa menghiraukan yang lainnya.[19]

Arif, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam" tulisan ini membahas tentang konsep islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Banyak merujuk pada pandangan tokoh-tokoh islam seperti Ibnu khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali,Yahya bin Umar dan beberapa di antaranya. Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar.[20] Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pentingnya peran pemerintah terhadap pasar,

---

[19] Indra hidayatullah, *Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar*,Iqtishoduna 2019. Vol.8 No.1

[20] M.Arif Hakim, *peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar*.Iqtishadia,2015. Vol 8,No 1,Hal:15

batasan penelitian hanya melihat bagaimana pandangan tokoh islam sebelumnya dalam menjalankan mekanisme pasar.

Jefferson Situmorang, peluang untuk mendongkrak perekonomian melalui ekspor dari hasil pertanian kelapa sawit sangat menjanjikan dimana disaat komoditi yang lain mengalami penurunan. Setelah masa konversi pendapatan petani plasma PIR-BUN sangat bergantung kepada harga TBS dalam penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pemerintah berperan dalam menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat sebagaima pemenuhan hak warga negara melalui kebijaksanaan penetapan harga beli TBS karena dalam kasus ini terjadi perbedaan antara harga beli swasta dan plasma sehingga berpengaruh terhadap kelestarian petani, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berjalan efektif dan secara signifikan walaupun masih ada beberapa kendala.[21]

Ekonomi Politik '*Rent-Seeking*' Dalam Jaringan Kepentingan Pertambangan Emas Di Jember'' skripsi milik mahasiswa Program studi ilmu politik, fisip, Universitas Airlangga atas nama Uki Yunita. Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus di pertambangan emas di gunung manggar desa kesilir kecamatan wuluhan kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam penilitian ini berfokus kepada jaringan kepentingan yang ada di dalam pertambangan emas tersebut, dari metode penelitian ini peneliti berusaha mengambil beberapa langkah dalam mencari kebenaran tentang statement yang lahir selama ini di masyarakat berdasarkan fakta atau hanya sekedar opini. Perbedaan penelitian ini terdapat pada daerah dan juga pada studi kasus, jika penelitian ini berfokus kepada

[21] Jefferson Situmorang.Analisis Kebijakan Harga TBS Kelapa Sawit pada PIR Perkebunan SEI Besitang Sumatera Utara

pertambangan emas sedangkan skripsi ini fokus kepada peran pemerintah dalam mempengaruhi stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) yang mana di dalam hal ini PMKS dan pemerintah yang menjadi objek penelitian.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat bagi berbagai pihak, penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan dalam kajian ilmu politik serta referensi dalam penelitian kebijakan pemerintah daerah dalam mempengaruhi stabilitas harga Tandan Buah Segar di kabupaten Nagan Raya

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pemerintah terkhususnya dalam studi kasus kebijakan pemerintah daerah dalam mempengaruhi stabilitas harga TBS di kabupaten Nagan Raya agar masyarakat (petani dan agen sawit) dapat lebih memahami bagaimana proses penetuan TBS dan kebenaran terkait permasalahan harga TBS yang sering kali terjadi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Ekonomi

2.1.1. Adam smith (Invisible Hand)

Seiring perkembangan zaman ilmu ekonomi semakin mengalami transformasi ke arah yang lebih baik, ilmu ekonomi mengajari proses intelektual dan pengelolaan yang dapat melahirkan konsep baru melalui pendekatan pengalaman yang cenderung memberikan nilai positif dengan mengabaikan nilai normatif yang selalu didasarkan pada benefit yang didapatkan padahal pada hakikatnya ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang tidak bisa lepas dari aspek normatif.

Sejak revolusi ekonomi yang diciptakan oleh Adam Smith perekonomian mengalami rotasi yang begitu pesat di ilmu pengetahuan. Adam Smith yang merupakan penggagas paham klasik selalu menempatkan faktor kapital didepan untuk bisa mengukur kesuksesan perekonomian sehingga paham ini kemudian dikenal sebagai kapitalisme. Menurut Adam Smith setiap orang berhak menggunakan kekayaan ekonominya sebagaimana yang dikehendaki oleh pemiliknya, apabila ia memiliki keinginan untuk kepuasan dari sumber ekonomi yang ada dalam hal ini mereka menganut unsur rasionalitas ekonomi, bentuk ekonomi Adam Smith merupakan tindakan untuk memperoleh benefit secara aman karena dia melihat usaha kapital secara masuk akal.

Kapitalisme ialah sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya dijalankan sesuai dengan keadaan pasar dan campur tangan pemerintah sangat minim, ia

beranggapan pasar akan berjalan dengan sendirinya atau diatur oleh tangan tak nampak (*Invisible Hand*). Kapitalisme mengedepankan hak perseorangan dan mengeyampingkan hak kepentingan orang banyak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dalam sistem ekonomi ini unsur utama yang mempengaruhi ialah dengan perolehan, persaingan dan rasionalitas. [22] Sebagai seorang pendukung kebebasan alamiah, Adam Smith yakin terhadap pemerintahan yang hemat namun kuat. Menurutnya terdapat tiga tujuan pemerintah, yaitu[23]:

1. Mengangkat negara dari yang sedang terpuruk keadaannya menjadi negara yang makmur secara menyeluruh dan dengan cara yang damai.
2. Meringankan pajak.
3. Mempermudah proses pelayanan administrasi yang adil dan menghargai. Dalam masalah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah.

Smith mendukung adanya dana yang imbang dan menentang utang publik yang terlalu besar. dia mendukung privitasisai, melakukan penjualan harta konglomerat (harta tanah) sebagai solusi menambah pemasukan dan menciptakan kemakmuran. dia berpikir bahwa sebaiknya pemerintah sebaiknya mengurangi campur tangan dalam kehidupan perekonomian seminimal mungkin sebagaimana disebutkan di atas ketiga point tujuan pemerintah atau

[22] M.Abdul Mannan,Teori dan Praktek Ekonomi Islam,Terj.M.Nastangin,Dana Bakti Wakaf,Yogyakarta,1995,Hal.311

[23] Danhert,Clyde E.,Adam Smith,Man of Latters and Economic, (New York:Clarendon), 1974,hlm:218

pentingnya campur tangan pemerintah menurut Adam Smith tak lain ialah untuk membantu memperlancar usaha dari para investor.

2.1.2 Pemikiran Ekonomi Karl Marx

Carl Marx merupakan tokoh besar yang tentunya sangat banyak dikenal oleh kaum sosialis dimana perannya dalam mendukung kaum sosialis sangat menakjubkan. Pandangan marx terhadap praktek kapital sepihak dan sangat tidak baik, menurut Karl Marx Pasar bebas tentunya akan menimbulkan suatu keadaan yang sangat negatif bagi masyarakat hal tersebut juga merupakan konsekuensi dari terbentuknya pasar bebas ini yaitu melebarnya kesenjangan sosial jadi adanya pasar bebas hanya akan memberi keuntungan bagi para pemuda yang memiliki modal besar atau mereka-mereka yang memiliki alat produksi ataupun para pemilik modal yang memang telah menjadi kaya dan akan makin kaya sedangkan untuk buruh atau para pekerja sangat dirugikan dengan adanya suatu mekanisme pasar bebas yang diciptakan..[24]

Pada 1843 Engels mengeluarkan artikel yang berjudul "*The Outline of a Critique of Political Economy*" dia beranggapan bahwa ide perekonomian yang baru yang mendukung kompetisi dan perdagangan bebas, yang diawali Adam Smith, merupakan sebagian kemajuan pada persoalan yang telah lewat namun dengan tidak mempertanyakan kembali kekayaan pribadi merupakan hal yang yang tidak baik karena telah menutupi fakta tentang kapitalisme bisa mengacu pada kejahatan sosial ekonomi.[25]

---

[24] Nurul Wahida,*Kritik Karl Marx Terhadap Kapitalisme Dan Pengertian Ekonomi Sosialisme*.UIN Alauddin Makassar.

[25]Karl Marx,*Kapital Sebuah Kritik Ekonomi Politik*.(Jakarta:Hasta Mitra,2004),h. 17.

Tiga puluh lima tahun kemudian, menurut Marx dalam tulisan-tulisannya mengenai ekonomi, lebih jauh dan sangat mendalam kritik tersebut dalam karyanya seperti *Contribution to a Critique of Political Economy*. Ekonomi politik yang dimaksud oleh Marx menunjuk pada pemikiran ekonomi yang dimulai oleh Adam Smith termasuk Ricardo, Malthus dan tokoh ekonomi klasik lainnya. Dalam menggunakan istilah tersebut, Marx tidak keluar dari penggunaan umum pada masanya itu namun kritiknya merintis jalan bagi perubahan arti.

Menurut Karl Marx, manusia itu merupakan makhluk sosial maka dari itu aktivitas ekonomi tidak boleh dikuasai oleh individu tapi harus dikelola bersama-sama yang diatur oleh negara. Jadi Marx kemudian memperkenalkan konsep sosialisme sebagai sistem ekonomi yang terpusat yang menjadikan pemerintah sebagai kunci penting dalam menjalankan roda perekonomian. Sistem ekonomi yang dipelopori oleh Karl Marx ini merupakan kebalikan dari konsep yang dimunculkan oleh Adam Smith, sosialisme merupakan sistem ekonomi yang mana peranan pemerintah didalam mengatur roda perekonomian sangatlah penting segala kegiatan dan perencanaan terpusat dari pemerintah atau lebih tepatnya perekonomian diatur oleh tangan nampak *(Visible Hand)* yaitu pemerintah itu sendiri.

Sistem ekonomi sosialis bukan berarti melarang kebebasan individu dalam perekonomian melainkan setiap individu masih bebas dalam melakukan praktek ekonomi tetapi sangat terbatas sekali, karena adanya peranan pemerintah yang begitu besar dalam mengontrol pasar sehingga pasar dapat

berjalan dibawah kendali, hal tersebut berusaha mewujudkan kemakmuran masyarakat bersama agar tak ada yang dirugikan walaupun di satu sisi memiliki efek negatif juga dimana kreativitas dari setiap individu melemah karena adanya aturan yang seperti sebuah ikatan yang membuat kurang leluasa dalam menggerakkan ekonomi secara mandiri karena dibayangi pemerintah yang memperjuangkan kemakmuran bersama.[26]

Menurut Marx dan Engels bahwa ekonomi politik sains muncul seiring dengan kapitalisme sebab sifat ekspolitatif dari sistem-sistem ekonomi prakapitalis merupakan transparan, mereka tidak memerlukan suatu sains tersendiri untuk menjelaskan mereka hanya ideologi (umumnya agama) untuk melegitimasi mereka, akan tetapi watak eksploitasi kapitalis tidak transparan (tersembunyi di balik kedok uang dan hubungan pasar), memerlukan sains ekonomi (ekonomi politik) tersendiri untuk mengungkapkannya.

Dalam hal ini peneliti lebih tertarik dengan konsep pemikiran ekonomi Karl Marx yaitu paham sosialis dimana menurut peneliti kehadiran pemerintah di dalam perekonomian memang sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti salah satunya monopoli pasar yang dikhawatirkan masyarakat kecil menjadi korban, hal lain ialah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar, karena sebaik-baiknya pasar ialah pasar yang dapat dikontrol dan memiliki keterbukaan informasi juga terdapat tempat pengaduan oleh masyarakat

[26]Mhammad Tho'in,"Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis),"Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 03, 2015. H. 125

langsung hal tersebut merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.

2.2 Teori Permintaan *(Demand)* dan Teori Penawaran *(supply)*

Permintaan dan penawaran mengawali pemahaman tentang konsep pasar. Pengertian pasar tidak hanya dengan melihat keadaan fisik dari pasar, tetapi pasar lebih memperlihatkan pada adanya hukum atau ketentuan tawar menawar atau negosiasi untuk transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual. Lebih mudah untuk dipahami bahwa pembeli memiliki keleluasaan dengan penjual dalam melakukan proses transaksi. Dalam keadaan semacam ini transaksi terjadi secara langsung dimana pembeli bertatap muka dengan penjual. Sebagai kebutuhan akan suatu produk yang diinginkan dan uang sebgai alat untuk membelinya[27]

Proses globalisasi yang semakin maju teknologi membuat orang-orang tidak mesti harus bertatapan secara langsung lagi melainkan bisa melalui smartphone, artinya pembeli tidak harus repot-repot lagi untuk ke pasar lagi bertatapang dengan penjual. Dalam proses transaksi tersebut tidak jarang melibatkan pihak ketiga, yaitu perantara yang akan dapat mengurangi biaya transaksi seperti contohnya sekarang aplikasi-aplikasi belanja online.[28]

Permintaan (*demand*) bisa diartikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta oleh pasar tertentu dengan tingkatan harga tertentu yang sudah disesuaikan pada tingkatan pendapatan tertentu dan dalam periode yang sudah ditentukan. [29] Permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang

---

[27]Indri dkk, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Indonesia,2008), Cet. Ke 1, H.97.

[28] Damanik,Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ekonomi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis(Jawa Tengah:Tisara Grafika Salatiga).Hlm.33

[29] Putong (2002), Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: Ghalia Indonesia.

merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Demand seperti ini lebih tepat disebut sebagai permintaan pasar (market demand), dimana tersedia barang tertentu dengan harga yang tertentu pula.

Penawaran memiliki definisi bahwa barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan harga tertentu dalam suatu kondisi. Dimata mereka "semakin tinggi harga untuk suatu produk, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan untuk di jual di pasar dan sebaliknya bila harga barang itu turun, maka semakin sedikit barang untuk di jual di pasar, karena produsen enggan memproduksi lebih banyak karena sedikitnya pembeli."[30] Dalam beberapa hal, ada yang membedakan antara penawaran Islam dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan.

Hukum penawaran. Dimana ketika harga barang atau jasa ditentukan dalam hukum penawaran berbunyi "semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut, semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut."[31] Teori penawaran mengatakan jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut cenderung naik. Teori ini dapat dijelaskan, apabila pada pasar terdapat penawaran tentang sebuah produk yang begitu banyak, maka:

---

[30] Yoeti, Oka A, 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya. Paramita: Jakarta.

[31]Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 89.

- Barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Hal ini tentu sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari dimana barang yang sudah terdapat ketersediaan yang begitu banyak maka harganya pasti akan turun contoh sederhananya saja seperti cabai, bawang, minyak, dan lain sebagainya.
- Penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara menjual cepat atau membuat produknya terjual sebanyak mungkin.

Sebaliknya jika suatu pasar terdapat suatu pasokan barang yang sedikit, maka hal tersebut akan mengakibatkan harga barang-barang ikut naik.[32]

Belajar pada peradaban Islam Rasulullah dalam berdagang memberikan penawaran secara terperinci tentang spesifikasi barang yang di sediakan atau dijualnya. Dalam paham ini, teori penawaran ini memberikan penjelasan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Pergeseran kurva juga berimbas pada harga dan jumlah penawaran yang di tawarkan. Hal semacam ini juga berlaku sebagai konsekuensi dari pergeseran kurva tersebut. Dengan kata lain definisi penawaran bisa juga dijelaskan dengan proses pada umumnya, sumber dan teknik produksi yang digunakan oleh seorang produsen dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan jumlah yang diproduksi[33]. Dalam memahami ekonomi para ekonom mengemukakan dua kata yang paling sering

[32]Skripsi Uin Suska Riau. Hal : 26.

[33] Abdurrohman Kasdi, 2016. Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintoro Demak).Vol.4 No.2.Hlm.19-23

digunakan permintaan dan penawaran. Keduanya merupakan kekuatan yang paling penting untuk membuat perekonomian pasar berjalan dan bekerja.

Kemudian untuk melihat mekanisme pasar maka dibutuhkan interaksi yang terjadi antara kedua hal tadi yaitu permintaan yang kebanyakan muncul dari sisi konsumen dan juga terhadap penawaran yang muncul dari sisi produsen, sehingga harga yang ditetapkan merupakan kesepakatan yang terjadi dari kedua belah pihak yang memiliki permintaan dan juga pihak yang memiliki penawaran oleh sebab itu, perilaku yang timbul dari permintaan dan penawaran bisa dikatakan sebagai suatu konsep dasar dari kegiatan berbisnis dalam dunia ekonomi.

2.3 Teori Distributive Combines

Untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap penelitian ini maka peneliti menyajikan teori yang menyangkut terhadap cara pandang untuk memahami penelitian ini yaitu menggunakan teori *Redistributive Combines*. Pada pemangku kebijakan, terdapat kebiasaan di Indonesia di mana formulasi hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan treatment membagi-bagikan kekayaan bukan malah menciptakan kebijakan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru. Bagi suatu wilayah atau negara yang tidak memahami secara sadar bahwa kekayaan dan sumber daya dapat bertambah apabila adanya dorongan keinginan untuk menciptakannya melalui suatu sistem kelembagaan yang benar-benar tepat dan juga anggota masyarakat ikut dilibatkan bahkan untuk kelas paling bawah sekalipun dapat menghasilkan kekayaan bilamana benar-benar dibina dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan retribusi

langsung. Pemangku kebijakan kerap kali melihat retribusi langsung sebagai cara padahal cara pandang ini sama sekali tidak dapat mempertimbangkan suatu realitas peraturan yang diciptakan untuk mengubah keputusan yang diambil dalam hal ini terkait bidang ekonomi untuk dapat mengubah peluang ekonomi yang terbuka selebar-lebarnya sehingga ekonomi masyarakat kelas bawah dapat tercipta dengan sendirinya untuk mencapai kekayaan.[34]

Pengambilan suatu kebijakan oleh pemerintah seharusnya dapat lebih memberi tekanan kepada kegiatan untuk melakukan penyaringan dan juga memilah suatu kelompok baik itu berupa kepentingan khusus, maupun kelompok kelompok kepentingan yang mereka anggap sudah tepat dan mengalihkan sumber daya kepada kelompok-kelompok bersangkutan melalui regulasi hukum sehingga terciptanya suatu kekayaan yang baru kepada kelompok yang berbeda dan ini dapat menunjang perekonomian suatu daerah.[35]

Permasalahan memanfaatkan hukum untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, era dewasa ini perkembangannya sudah sedemikian kompleks sehingga upaya untuk melakukan pembentukan organisasi dalam memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma (*unearned income*) yang diciptakan oleh negara disalurkan melalui sistem hukum seharusnya kebijakan tersebut diciptakan untuk melindungi segenap masyarakat namun malah melindungi segelintir saja atau kelompok tertentu hal ini dinamakan dengan teori "*redistributive combines*" (kelompok redistribusi), yang tidak memiliki batasan terhadap suatu bidang-bidang yang

[34] De Soto, Hernando. 1992. Masih Ada Jalan Lain (Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga). Jakarta Yayasan: Obor Indonesia Hal 249-250

[35] De Soto, Hernando. 1992. Masih Ada Jalan Lain (Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga). Jakarta Yayasan: Obor Indonesia Hal 249-250

lazimnya hal ini erat hubungannya dengan suatu kegiatan-kegiatan politik, partai politik, media massa, dan organisasi informal. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa perubahan-perubahan pada suatu susunan dan pimpinan puncak direksi dalam perusahaan seringkali disebabkan oleh suatu perubahan dalam kebijakan pemerintah.[36]

Kelompok ini biasanya memiliki pertarungan satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi kegiatan bisnis suatu kelompok atau golongan agar jangan sampai suatu peraturan baru yang dihadirkan akan mengancam kepentingan mereka, dalam upaya intervensi ini juga coba untuk memikirkan pola agar kebijakan yang hadir dapat menguntungkan. Akibatnya adalah pihak yang berwenang di negara jika membuat suatu aturan hukum hampir selalu saja dibayang-bayangi untuk tujuan pembagian pendapatan tanpa kerja dengan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok dalam mencapai suatu kepentingan terutama dalam hal ini adalah kepentingan mencapai kekayaan dalam proses berbisnis yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.[37]

Sumber-sumber ekonomi dilihat sebagai suatu aset yang sangat produktif dan modal didistribusikan secara terbatas hanya pada tahapan lingkungan segelintir orang saja atau golongan tertentu. Dengan demikian, dalam suatu negara korporatif mencapai tujuan kesejahteraan dan hasil-hasil dari sebuah pembangunan yang disebabkan oleh ekonomi hanya akan bergulir pada lingkungan yang sangat terbatas yaitu pada puncak kekuasaan yang dipegang oleh

---

[36] De Soto, Hernando. 1992. Masih Ada Jalan Lain (Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga). Jakarta Yayasan: Obor Indonesia.

[37] De Soto, Hernando. 1992. Masih Ada Jalan Lain (Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga). Jakarta Yayasan: Obor Indonesia.

segelintir pengusaha besar yang kemudian mereka hanya mendapatkan hak istimewa khusus tetapi hal tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan pendapatan rendah seperti kaum buruh. Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas maka perlu diperhatikan dengan baik akan berlakunya pola redistributive combines ini terjadi akibat suatu sistem politik yang sangat tertutup dikarenakan dilindungi oleh sistem hukum yang samar-samar dan juga ketiadaan rule of law di bidang ekonomi. Secara garis besar sistem ekonomi ini bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola yang sudah ditentukan tersebut. Suatu sistem hukum sengaja dibiarkan samar-samar baik dalam prosedur pembuatannya maupun penetapan pelaksanaannya yang memang kerap kali dikendalikan oleh tangan kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang dihasilkan hanya berpihak pada penguasa.[38]

2.4 Teori Kebijakan Publik

Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan publik merupakan hal yang sangat penting untuk melahirkan regulasi atau kebijakan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik, kebijakan merupakan instrumen pemerintah bukan hanya menyangkut aparatur negara tetapi juga menyangkut pemerintah yang melakukan pengelolaan kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan pada dasarnya ialah keputusan- keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur semua hal dalam kehidupan bernegara baik pengelolaan sumber daya alam, perekonomian, keamanan dan kenyamanan bagi kepentingan publik. Kebijakan merupakan hasil dari adanya kesinambungan atau komunikasi yang baik antara

[38] Arifin, Rachbini, (2001), Ekonomi Politik Dan Kebijakan Publik, Indef-Fisip. UI, Jakarta

berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Dalam definisi yang luas "*policy"* atau kebijakan mempunyai dua aspek pokok yaitu:

1. *Policy* diartikan sebagai suatu praktika sosial, dalam arti bahwa sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.kejadian semacam ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan tidak merupakan kejadian yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.sebagai contoh: kebijakan pemerintah dalam memberantas "Premanisme", hal ini timbul karena terjadinya ancaman dan ketidaktentraman dalam masyarakat diluar batas-batas kewajaran dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi masalah dan issue masyarakat.untuk menanggulanginya maka perlu adanya kebijakan atau *Policy* untuk mengatasi premanisme tersebut.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena diperlukan untuk mendamaikan *"claim"* (tuntutan) dari pihak pihak yang konflik,atau untuk menciptakan insentif bagi tindakan bersama oleh pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian Jika ada pihak-pihak yang konflik maka untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu policy. Selain itu jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama, akan tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak

sama dan tidak rasional, maka diciptakan suatu tindakan yang berupa policy yang dapat mendorong agar menciptakan situasi yang rasional. Policy semacam ini merupakan dorongan/insentif bagi pihak-pihak yang sudah sepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional

sebagai kesimpulannya, maka policy itu dapat dibentuk:

1. Suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat.
2. Merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif (dorongan) (Miftah Thoha, 1984).

James E. Anderson (1978) Merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan ilmuwan politik, Carl Friedrich, menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.[39]

Dalam buku Leo Agustino dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. dalam buku Leo Agustin yang mengatakan bahwa kebijakan

[39] Abdoellah.,Teori Dan Analisis Kebijakan Publik,Alfabeta:Bandung,(2016),hlm:13-17

adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud.[40]

Peranan pemerintah dalam mengawasi proses berjalannya pasar sangat penting agar pasar menjadi lebih kondusif. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan konsep pengawasan pasar pada masa lalu disaat itu pengawas pasar disebut Al-Hisbah yang kemudian banyak menjadi acuan negara-negara terhadap pasar,sementara dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam* Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan tentang fungsi Al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW sering melakukan pemeriksaan dengan langsung turun ke pasar untuk mengecek harga dan bagaimana pasar itu berjalan. seringkali dalam tinjauan langsung Rasulullah SAW menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya,[41] Oleh karena itu di era sekarang sangat penting adanya peran pemerintah dalam mengatur pasar bukan dengan maksud untuk mengintervensi tetapi melainkan sebagai stabilisator agar tidak terjadinya pasar yang merugikan orang lain,beda halnya dengan harga yang terjadi naik turun karna proses tawar menawar.

Ekspansi yang terjadi terhadap perkebunan kelapa sawit tidak selalu saja memberikan dampak negatif kepada kehidupan masyarakat. Namun kehadiran kelapa sawit juga dapat memberikan manfaat, sehingga perlu adanya suatu solusi

---

[40]Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta. 2006

[41]Hakim.,2015."Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam"Iqtishadia,Vol 8.No.1

cerdas terbaik untuk membatasi ekspansi hadirnya kebun kelapa sawit dalam mengurangi eksternalitas negatif dari industri pengolahan CPO. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah hadirnya kerjasama dari berbagai pihak, antara lain pemerintah swasta, dan masyarakat. Dalam satu kebijakan pengelolaan lingkungan misalnya salah satu hal yang harus dilakukan dengan diterbitkannya sertifikasi ISPO/RSPO.[42]

Ada beberapa kebijakan strategis yang dapat direkomendasikan. Antara lain transparansi mengenai dampak lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemantauan pelaksanaan sertifikasi minyak kelapa sawit baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun aplikasinya dilapangan, sehingga dalam pengelolaan diharapkan dapat memaksimalkan manfaat ekonomi namun meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.[43]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[42] Putri et al. (2018). Pengaruh perceived ease of use dan perceived usefulness terhadap kepuasan pengguna transaksi go-pay. Forum ilmiah pendidikan akuntansi progam studi pendidikan akuntansi-fkip universitas pgri madiun

[43] Ibid.

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metodelogi penelitian dengan klasifikasi deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini menggunakan penekanan yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Pendeskripsian terhadap data berupa wawancara merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini.[44]

Metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang menjadikan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati. [45] Definisi secara teoritis bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memberi pengumpulan data yang valid maupun suatu informasi mengenai fenomena yang sedang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang akan dilihat secara ilmiah.

Dalam hal penelitian ini digarap di kabupaten Nagan Raya, salah satu kabupaten di aceh yang memiiki PMKS sebanyak 11 perusahaan. Karna seringnya terjadi permainan pasar di kabupaten dengan industri yang begitu banyak ini maka peneliti melihat hal ini menjadi penting dan banyak menjadi keluh kesah masyarakat oleh karena hal tersebut lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian.

---

[44]Muhammad Khalifah Mustami, *Metode Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015),hal. 14.

[45]Bogdan Taylor, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1996), halaman:31

3.2. Sumber Data

Penentuan data konkrit atau sumber data untuk penelitian didasarkan pada suatu kemampuan dan kecakapan peneliti dalam mengusahakan untuk mengungkap suatu peristiwa secara subjektif, sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pengambilan data dilakukan secara konkrit terstruktur dan sistematis.

3.2.1. Data Primer

Data utama atau lebih kita kenal dengan data primer adalah data yang diperoleh melalui pengalaman secara langsung dengan informan kunci yang sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan terhadap penelitian ini informasi yang diberikan adalah informasi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Adapun informan penelitian kunci adalah informasi sudah ditentukan terlebih dahulu yang mengerti terhadap persoalan yang sedang diteliti yang berasal dari tokoh masyarakat dan pemerintah yang dalam hal ini berada di Kabupaten Nagan Raya.

3.2.2. Data Sekunder

Data pendukung atau lebih kita kenal dengan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat menunjang informasi terhadap penelitian ini apabila dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dengan berbagai cara seperti literatur review, referensi, observasi, artikel, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang menyangkut informasi terhadap penelitian ini. Data sekunder berfungsi untuk menghindari tidak validnya data yang didapatkan dari

hasil penelitian lapangan sehingga hasil dari penelitian ini merupakan komparasi daripada data primer dan data sekunder yang diolah oleh.

3.3. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati, merekam, mencatat perilaku yang terjadi dengan menggunakan metode observasi. Penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap peran pemerintah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar yang ada di Nagan Raya dengan tujuan penting agar mendapatkan gambaran secara luas dan lebih terperinci.

b.Wawancara

Interview atau lebih jamak didengar dengan kata wawancara merupakan cara pengumpulan data secara langsung yaitu bertemu peneliti dan informan. Dan tata cara ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang sedang dilakukan yang akan dijawab oleh informan yang sudah ditentukan terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang valid mengenai penelitian terhadap peran pemerintah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar yang ada di Nagan Raya.[46]

[46]Ibid.hal. 82

Pada tahapan wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang valid penelitian yang berhubungan dengan pasar tandan buah segar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan dari dokumen yang berupa buku jurnal surat kabar majalah daftar nilai dan sejenisnya.[47] Teknik dokumentasi sangat penting untuk melengkapi data-data dalam rangka menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[47]Muhammad Khalifah *Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (*Yogyakarta:Aynat Publishing, 2015), h. 149

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya

4.1.1 Profil Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nagan Raya

Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama 5 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosakata Aceh. Pun, belum tertemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait dari mana penyebutan nama tersebut muncul. Sedangkan Raya berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di Nagan,

kendati di dalam nama kecamatan tersebut tidak tercantum kata "Nagan", misalnya: Beutoeng yang mana merupakan salah satu kecamatan.

Perekonomian masyarakat di Nagan Raya dihasilkan dari Bertani, Melaut, dan beberapa pekerjaan lainnya. Namun lebih didominasi oleh bertani paling utama ialah pertanian kelapa sawit. 1/3 daratan di Nagan Raya ditanami kelapa sawit, baik itu perkebunan masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 51 ribu ha maupun perkebunan perusahaan yang lebih kurang 78 ribu ha, dengan produksi rata-rata 24 ton/ha dalam setahun.

Struktur penduduk di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2013 berdasarkan jeniskelamin memiliki proporsi yang hampir seimbang yaitu penduduk laki-laki sebesar79.157 dan penduduk perempuan sebesar 79.799. Pada tahun 2012 terdapat 76.069 jiwa laki-laki dan 76.061 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin adalah 99. Artinya, dari setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Jumlah keluarga Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2013 berjumlah 38.123 keluarga dan sebagain termasuk kategori keluarga. Miskin keluarga miskin terbagi dalam beberapa kategori antara lain: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga SejahteraI, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera Plus.

Secara Topografis, sebagian besar gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya merupakan wilayah dataran. Sisanya merupakan gampong yang memiliki topografi lembah/DAS dan lereng. Terdapat 17 gampong yang berbatasan dengan laut yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Darul Makmur,Tripa Makmur, Kuala Pesisir dan Tadu Raya.Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah yang potensial untuk budidaya berbagai komoditi

pertanian karena didukung oleh iklim yang bagus. Salah satu factor yang menentukan untuk budidaya komoditi pertanian adalah tingkat curah hujan.[48]

Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan 222 gampong (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). 2010, Jumlah penduduk di wilayah ini 138.670 jiwa Dengan luas daerah 354.491 ha dari 6,2% luas seluruh provinsi Aceh yaitu 5.677.081 ha, tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, Kabupaten Nagan Raya memiliki luas 3.363,72 km² dengan jumlah penduduk 167.672 jiwa.[49]

4.2.Faktor Penyebab Ketidakstabilan Harga TBS Di Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak yaitu Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dan Pemerintah kabupaten Nagan Raya diketahui penyebab ketidakstabilan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas bibit kelapa sawit;
2. Jarak Tempuh Untuk Transportasi CPO Masih Tergolong Jauh;
3. Penentuan Harga Jual Yang Rendah Akibat Kualitas TBS Yang Minim Oleh PMKS.

4.2.1. Kualitas Bibit Kelapa Sawit

Meningkatnya sektor agraris pada kelapa sawit menjadi suatu keunggulan yang dapat menguntungkan masyarakat karena manjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Kelapa sawit diolah

[48] Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya

[49] Nagan Raya. 2021. Pemerintah Kabupaten nagan Raya. https://naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten

menjadi CPO (*cruide palm oil*) oleh karenanya semakin hari semakin banyak pula PMKS yang didirikan di Nagan Raya. Saat ini kabupaten Nagan Raya memiliki PMKS terbanyak diantara kabupaten lain yang ada di Aceh. Hal itu terbukti dengan keberadaan 11 pabrik minyak kelapa sawit (PMKS). Hasil olahan kelapa sawit yaitu *Crude palm oil (CPO)* adalah salah satu produk pertanian Indonesia yang banyak dikembangkan. CPO diproduksi oleh pabrik kelapa sawit (PKS).[50]

Dalam hal ini kualitas CPO ataupun rendemen itu sangat dipengaruhi oleh kualitas TBS kelapa sawit itu sendiri dikarenakan sawit dengan kualitas yang kurang baik akan menghasilkan rendemen yang kurang baik pula. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat harga TBS cenderung tidak dapat disama ratakan dikarenakan hasil rendemen yang didapatkan itu tidak memenuhi target oleh karenanya pemilihan bibit sangat menentukan.[51]

Perbedaan hasil rendeman dari beberapa PMKS yang ada di Nagan Raya menjadi salah satu faktor harga TBS berbeda tipis antara satu sama lain, selain itu jenis bibit yang digunakan juga berbeda yang menambah ketidakstabilan harga TBS. Jika menggunakan bibit tanaman kelapa sawit tenera itu hasil panennya dalam 1 hektare bisa mencapai 2 ton/sekali panen sedangkan sawit biasa dalam 1 hektare hanya berada pada kisaran 1,2 ton-1,5 ton/sekali panen jadi ini merupakan perbandingan yang sangat besar terkadang juga masyarakat petani sawit dalam memanen itu sering putaran panennya tidak tetap disaat kadang perlu uang buah

[50] Wawancara dengan Disbun Nagan Raya
[51] Wawancara dengan PMKS

sawitnya langsung dipanen sedangkan keadaan buah masih mengkal buah lolos sortasi tapi minyak atau rendemennya kurang baik jadi seperti itu.[52]

Seiring dengan berkembangnya teknologi pertanian maka semakin berkembang pula ilmu mengenai kelapa sawit sekarang sudah ada beberapa jenis bibit yang dapat kita temui pada tanaman kelapa sawit mulai dari yang paling hingga yang biasa berikut jenis-jenis bibit kelapa sawit:

1. Tenera

Bibit tenera ini merupakan hasil persilangan dari dua jenis bibit terdahulu yakni *dura* dan *pisifera.* Bibit tenera ini jauh lebih baik ketimbang kedua induknya dimana tenera memiliki cangkang yang tipis dan kandungan minyak yang terdapat didalamnya juga 30% lebih banyak dibandingkan dengan kedua induknya walaupun sekarang terus dilakukan pengembangan terhadap jenis bibit baru namun semuanya berasal dari jenis tenera yang sudah teruji ini. Alasan mengapa jenis ini sangat baik ialah karena beberapa keunggulan yang ada padanya antara lain ialah setiap TBS yang dihasilkan memilki kandungan minyak yang cukup baik yang berasal dari *mesocrap* (daging sawit berwarna kuning). Kemudian jenis tenera juga menghasilkan tandan yang lebih banyak dibandingkan jenis lain karena hal ini peluang trek (masa pohon kelapa sawit tidak berbuah) menjadi lebih kecil dibandingkan menggunakan jenis bibit lain. Jenis ini bisa dikenali dengan melihat cangkang yang lebih tipis dibandingkan dengan jenis lain.[53]

[52]Hasil wawancara dengan PMKS Nagan Raya
[53]Wawancara dengan PMKS

2. Pisifera

Bibit jenis ini memiliki karakter yang cukup unik namun sangat susah untuk ditemukan dikarenakan jarang ada yang menanam justru jenis sawit ini lebih cocok untuk digunakan sebagai induk dalam persilangan. Pada jenis pisifera buah yang dihasilkan tidak memiliki cangkang buah seperti tenera dan dura sehingga kernel (inti dalam) juga tidak dimiliki oleh jenis ini yang dimana sebetulnya minyak yang dihasilkan dari kernel ini merupakan minyak paling bagus. Bunga betinanya steril sehingga buah yang dihasilkan sangat langka oleh karena hal tersebut jenis bibit pisifera ini sangat tidak dianjurkan untuk dijadikan tanaman komersil tetapi lebih cocok untuk dijadikan induk jantan dalam proses persilangan.

3. Dura

Jenis bibit ini merupakan jenis bibit yang paling banyak terdapat pada tanaman kelapa sawit milik masyarakat dimana TBS kelapa sawit dari bibit ini dapat menghasilkan buah yang sangat berat oleh karena itu bibit ini menjadi pilihan favorit petani di daerah yang masih belum terlalu paham mengenai kekurangan jenis bibit ini, pada dasarnya jenis sawit dura ini merupakan induk betina yang digunakan dalam proses penyilangan. Kerugian yang didapatkan dari jenis sawit dura adalah kandungan minyak yang lebih sedikit cangkang yang terlalu tebal sehingga terkadang dapat memperpendek umur alat-alat pengolahan pada pabrik minyak kelapa sawit. Jenis dura ini memiliki produksi tandan yang

lebih sedikit dibandingkan dengan jenis tenera sehingga hasil panen menjadi berkurang dan masa trek juga sangat sering terjadi.[54]

4.2.2. Jarak Tempuh Untuk Transportasi CPO Masih Tergolong Jauh

Akses pengiriman CPO dari hasil olahan pabrik minyak kelapa sawit yang ada di Nagan Raya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan harga TBS yang ada di Nagan Raya dengan daerah lainnya. Disaat harga turun begitu jauh menyebabkan masyarakat khawatir hingga sebagian petani Kelapa sawit mengupayakan sendiri dengan meminta toke sawit atau agennya menjual kelapa sawit ke daerah lain seperti Subulussalam dengan harga penjualan jauh lebih mahal dibandingkan dengan Nagan Raya. Masyarakat Tripa Makmur mengharapkan adanya perlindungan dari pemerintah agar perusahaan yang ada di Nagan Raya dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti di daerah lain. Masyarkat juga berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga TBS dan memberikan solusi terhadap persoalan ini.[55]

Misalkan dibandingkan dengan daerah lain seperti Sumatera utara, riau dan daerah lain di Indonesia. Bahkan terkadang dengan daerah di dalam Aceh seperti subulussalam juga terjadi perbedaan harga karena jarak pengiriman. Di Nagan Raya semua PMKS harus mengirimkan hasil olahan minyak kelapa sawitnya melalui transportasi darat yang jarak tempuhnya memakan biaya yang begitu besar, hal ini dikarenakan mobil tangki pengangkut CPO tidak berani melewati jalur Barsela. Oleh karena itu harus memutar jalur Timur Aceh karena jika tidak resiko yang diterima akan begitu besar yang mana jalur Barsela ini terdapat begitu

[54]Suzanne L.dkk, smallholder oil palmhandbook.2016
[55]Hasil wawancara dengan petani Nagan Raya

banyak gunung yang membuat mobil tangki kesulitan mendaki, beban mobil yang begitu berat ditambah medan jalanan yang tidak kondusif membuat pertimbangan yang begitu besar. Yang lebih parahnya lagi kecelakaan dan CPO dalam tangki tumpah ke jalan raya yang mengakibatkan jalan licin sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.[56]

4.2.3. Penentuan Harga Jual Yang Rendah Akibat Kualitas TBS Yang Minim Oleh PMKS

Persoalan harga memang berasal dari berbagai masalah, salah satunya ialah dimana terkadang karena sedikit keuntungan yang di dapat. Hal ini disebabkan oleh kualitas rendemen TBS yang tidak mencapai target sehingga pihak PMKS menurunkan sedikit harga agar dapat menutupi kerugian tersebut. Hal ini memang sering terjadi terkadang permainan harga juga dilakukan di saat TBS terlalu membludak seperti menjelang hari kebesaran hari raya idul fitri dan idul adha semua petani kelapa sawit hampir berbarengan melakukan panen menjelang lebaran sedangkan kapasitas pengolahan dan daya tampung loding (tempat pengumpulan TBS dari mobil sebelum di olah) tidak memungkinkan menampung jumlah TBS yang begitu banyak. Hal ini mengakibatkan kualitas buah menurun karena terkadang ada yang sudah sampai busuk dan belum dapat di olah. Kemudian resiko lain juga mesin pabrik yang terlalu dipaksa akan kepanasan dan

[56]Wawancara dengan PMKS

rusak sehingga memakan biaya perbaikan lagi maka karena beberapa resiko tersebut terkadang harga di atur berdasarkan perhitungan pabrik.[57]

Persoalan perbedaan harga pada tahapan ini dinilai masih kurang relevan terhadap keluh kesah masyarakat lantaran PMKS di daerah tetangga dapat membeli lebih mahal jika diliat pada faktor bibit memang berpengaruh namun di daerah sekitaran Aceh Barat dan Aceh Jaya juga tidak dapat dipastikan kualitas bibit milik petani rata-rata menggunakan tenera atau bibit unggul. Perbedaan harga Rp.200 merupakan angka yang besar bagi petani jika dikalikan 1 ton Rp.200 ribu dan jika satu mobil colt muatannya mencapai 10 ton maka terjadi perbedaan harga 2 juta rupiah.

Selain faktor-faktor di atas yang menyebabkan harga TBS tidak stabil terdapat faktor Eksternal seperti kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pusat yang baru-baru ini yaitu Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligatin (DPO) yang membuat harga secara spontan berubah. Kemudian pengaruh pasar global dimana Demand dan Supplay menentukan harga semakin tinggi permintaan pasar terhadap suatu produk maka akan tinggi nilai produk tersebut dan sebaliknya. Dikala CPO ditolak oleh negara luar maka akan overload CPO di dalam negeri sehingga harga akan turun. Faktor-faktor ini tidak dibahas lebih dalam dikarenakan cakupan pada penelitian ini yang hanya ingin melihat kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan harga yang dikeluhkan oleh masyarakat petani Kabupaten Nagan Raya.

[57]Wawancara dengan PMKS

4.3 Kebijakan Pemerintah Kabupatem Nagan Raya Dalam Mempengaruhi Stabilitas Harga TBS

Harga TBS dalam keadaan tidak stabil pemerintah ikut andil secara tidak langsung dalam proses menstabilkan harga TBS di tingkat pengepul lokal. Dalam mencari solusi tentu harus ditempuh dengan berbagai kebijakan. Fungsi pemerintah sebagai stabilisasi ekonomi dalam memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh rakyat yang berada di dalam negaranya, maka teori kebijakan publik menyatakan kebijakan merupakan praktika sosial, dalam arti bahwa sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat maka dari situ kita dapat melihat peran apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk memperjuangkan hak rakyatnya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1.Revitalisasi Tanaman Kelapa Sawit;

2.Pembangunan Pelabuhan CPO dan Sarana Pendukung;

3.Pengawasan Oleh Disbun Kepada Pihak PMKS

4.3.1. Revitalisasi Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit yang sudah berumur akan sangat mengurangi hasil panen dan demikian pula dengan jenis tanaman yang tidak berkualitas, oleh karena hal tersebut pemerintah Nagan Raya dalam membantu petani kelapa sawit melakukan revitalisasi tanaman kelapa sawit milik petani. Dengan pemberian pemahaman terkait dengan kualitas bibit yang baik dan disarankan agar bisa mendapatkan hasil yang baik pula untuk petani kelapa sawit khususnya di Nagan

Raya, proses revitalisasi ini memang tidak dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh cakupan daerah kabupaten Nagan Raya dikarenakan tanaman yang akan di revitalisasi memiliki syarat-syarat tertentu mulai dari pembentukan kelompok tani dan kemudian umur tanaman atau tingginya sehingga dengan hal ini proses revitalisasi harus dilakukan secara bertahap.[58]

4.3.2.Pembangunan pelabuhan CPO dan Sarana Pendukung

Perlunya pelabuhan laut dan pengkajian ulang transportasi CPO merupakan dua kebijakan paling penting oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya. Pembangunan pelabuhan CPO dapat memperlancar proses ekspor CPO ke luar negeri. Disamping itu, di pelabuhan tersebut akan adanya prasarana pendukung seperti keran, tangki penampungan CPO, dan prasarana lain. Dengan adanya tangki CPO akan mempermudah dalam penyimpanan CPO di pelabuhan dengan begitu akan menghemat waktu dan proses pengapalan.[59]

Menurut Gurning dan Budiyanto, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan layanan jasa. Utamanya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.[60] Sementara itu Suranto, mengatakan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai

[58]Wawancara dengan Disbun Nagan Raya
[59]Hasil wawancara dengan DPRK Nagan Raya
[60] Gurning, dkk. 2007. Manajemen Bisnis Pelabuhan. PT Andhika Prastya Ekawahana

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan faslitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan dan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. [61] Wibowo mengatakan bahwa pengembangan wilayah merupakan usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antar system manusia atau masyarakat, lingkungan hidup dan sumber daya alam.[62] Penelitian yang dilakukan Ahmed dan Hossain, menunjukkan bahwa daerah yang infrastruktur transportasinya berkembang, memperoleh keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan desa-desa yang infrastruktur transportasinya belum berkembang.

Transportasi merupakan hal yang sangat menetukan naik turunnya suatu harga dimana disaat transportasi dapat berjalan dengan lancar maka perputaran uang juga akan meningkat, dimana akses sangat mudah, begitu sebaliknya disaat transportasi memiliki masalah, maka akan berefek juga terhadap perekonomian. Contohnya disini ialah mengenai transportasi CPO yang harus menempuh jarak yang sangat jauh sehingga akan memakan biaya yang lumayan besar oleh karena itu pemerintah Nagan Raya dalam rangka pembangunan infrastruktur pelabuhan CPO demi meningkatkan perekonomian petani masyarakat Nagan Raya dan

---

[61] Suranto. 2004. “Manajemen Operasional Angkatan Laut dan Pelabuhan Serta prosedur Impor Barang”. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

[62] Wibowo R. dkk..1999. Refleksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Nusantara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

membantu mendongkrak harga komoditi andalan daerah yakni kelapa sawit. Ketika pelabuhan yang direncanakan di Nagan Raya dengan melakukan kerja sama dengan BUMN 25 tahun pertama mereka yang kelola dan selanjutnya menjadi hak daerah. Ketika berhasil maka proses pengiriman CPO dapat langsung ke mitra kerja yang akan menampung hasil olahan minyak mentah dari Nagan Raya, artinya minyak yang dikirimkan merupakan hasil olahan dari 11 PMKS yang ada di dalam daerah ini sendiri dan jika kemudian infrastrukturnya memadai dapat membantu menampung CPO yang ada di daerah tetangga seperti Aceh Barat,Abdya dan Aceh Jaya dimana ketiga daerah ini tidak perlu lagi menempuh jalur darat yang begitu jauh.

a. Pembangunan Sarana-Prasarana Pelabuhan CPO

Pembangunan infrastruktur pelabuhan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.[63]

Berbagai studi telah dilakukan menunjukan begitu pentingnya peranan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan bahkan secara spesifik terhadap perkembangan sektor

[63]Adris. "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Ilmiah media enginering, Vol.6 No.1

pertanian. Kemudian studi lainnya juga menunjukkan bahwa investasi infrastruktur berpengaruh secara signifikan kepada pembangunan, terutama pada tahap awal pembangunan suatu negara.[64] Melihat besarnya dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur ini, Bank Dunia menyat akan bahwa investasi di bidang infrastruktur memiliki peranan yang jauh lebih besar daripada investasi dalam bentuk kapital lainnya. Sementara itu penelitian yang dilakukan Calderon dan Serven menunjukkan bahwa adanya dampak pengembangan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Studi ini menggunakan sampel data dari 121 negara-negara pada periode 1960-2000. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang sesuai memberikan pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang buruk akan berdampak negatif pada pemerataan pendapatan.[65] Di dalam infrastruktur pelabuhan tentu akan mencakup beberapa bagian penting seperti tangki penampungan CPO yang dimana mobil tangki yang mengangkut minyak mentah dari PMKS tidak perlu menunggu proses bongkar muat secara langsung karena akan memakan waktu yang begitu banyak hal ini akan berefek pada pengeluaran biaya transportasi, dengan adanya tangki tersebut juga membuat minyak tetap panas sehingga tidak mempengaruhi kualitas dari CPO tersebut. Kemudian fasilitas lain seperti Kapal pengangkut dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.

---

[64] World Bank. 1994. Infrastructure for Development, World Development Report 1994

[65]Calderon. “The Effects Of Infrastructure Development On Growth and Income Distribution”. 2004.

Selama ini memang di wilayah Aceh masih sangat ketertinggalan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu alasan pembangunan pelabuhan CPO ini memang menjadi sangat penting, dikarenakan selama ini hasil pengolahan minyak mentah atau CPO yang bersumber dari 535.000 hektare perkebunan kelapa sawit di seluruh Aceh dan 235.400 hektare atau 44% diantaranya merupakan perkebunan rakyat, data bersumber dari Apkasindo. Keseluruhan hasil minyak mentah tersebut harus dikirimkan melalui daerah lain yaitu Belawan, Sumatera Utara.[66]

Dengan adanya pelabuhan tentu akan sangat membantu mendongkrak harga TBS yang ada di wilayah Aceh terutama di Nagan Raya sendiri. Selama ini proses pengangkutan CPO yang harus berputar menuju ke Sumatera Utara melalui jalur timur Aceh tentu saja memakan biaya yang begitu besar baik dari waktu perjalanan, BBM dan pengeluaran lain mobil tangki pengangkut CPO, uang jalan dan waktu tunggu bongkar dari mobil tangki ke tangki besar di pelabuhan. Semua hal tersebut dapat terpangkas jika ada pelabuhan di daerah sendiri, hal yang demikian terlihat sederhana namun memakan biaya cukup besar jika dihitung secara terperinci. Selama ini harga TBS di Aceh selalu berada dibawah harga daerah luar seperti Sumatera Utara hal tersebut ditetapkan Distanbun Aceh berdasarkan perhitungan atas semua aspek dan trasnportasi tentu paling mendominasi.

[66] Okezone.com. “petani minta pemerintah bangun pelabuhan ekspor CPO”. 2022.

b. Penentuan Lokasi Pelabuhan

Dalam rancangan pemerintah Nagan Raya lokasi yang sudah disiapkan untuk pembangunan pelabuhan CPO itu berada di tengah-tengah Kabupaten Nagan Raya atau tepatnya berada di kawasan Kuala Tripa kecamatan Tripa Makmur. Lokasi yang sangat strategis jika melihat titik keberadaan PMKS yang ada di Nagan Raya dan juga dapat memberikan kemudahan ekspor CPO kabupaten tetangga seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Abdya.[67]

Pelabuhan CPO di wilayah Nagan Raya, awal mula perencanaan pembangunan pelabuhan pihak kementerian meminta 18 hektare tanah untuk pembangunan pelabuhan kemudian dilakukan perluasan menjadi 35 hektare dikarenakan jumlah PMKS yang cukup memadai di Nagan Raya yang mencapai 11 unit dalam satu daerah. Kemudian DPRK Nagan Raya mengusahakan tanah tersebut dan kemudian mengenai laut yang dangkal juga masih dalam pertimbangan apakah nanti akan dibuat seperti pelabuhan biasa atau dibuatkan pipa saja dan ditempat berdiri kapal besar dibuat tangki penampungan.[68]

Setelah survei dilakukan di daerah Tripa Makmur dimana tempat perencanaan pelabuhan, dari hasil survei awal tersebut ditemukan persoalan mengenai kedalaman laut yang hanya 15 meter hampir 2 kilo meter bibir pantai maka oleh hal tersebut pembuatan seperti keran air menjadi salah satu opsi terkait persoalan tersebut karena jika tidak kapal-kapal besar tidak bisa masuk.

[67]Hasil wawancara Disbun Nagan Raya
[68] Hasil wawancara dengan DPRK Nagan Raya

4.3.3. Pengawasan oleh Disbun kepada pihak PMKS

Dinas pertanian dan perkebunan yang merupakan lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap praktik perdagangan TBS di Nagan Raya selalu rutin melakukan pemantauan, bagaimana proses perdagangan setiap PMKS yang melakukan pelanggaran pembelian TBS dibawah harga yang telah ditetapkan oleh Distanbun Provinsi Aceh, maka karenanya PMKS yang melakukan pelanggaran akan ditindak lanjut dengan memberikan surat teguran kepada PMKS yang telah melakukan pelanggaran tersebut[69]

> *Karna keadaan pasar yang tidak stabil dimana Harga Tandan Buah Segar jatuh mengakibatkan perekonomian kami yang mayoritas pendapatan utama dari hasil panen kelapa sawit menjadi terpuruk.*

Terkait dengan kemampuan uang dalam membeli suatu barang tertentu, bahwa antara inflasi (naiknya harga-harga barang konsumsi) dan pendapatan petani di daerah Nagan Raya mempunyai hubungan berlawanan, masyarakat Nagan Raya yang sumber ekonomi rata-ratanya dari kelapa sawit merasa sangat terpukul dengan keadaan harga TBS yang seperti itu.

Petani dan Agen TBS di Tripa Makmur Nagan Raya, menyimpulkan bahwa harga penjualan TBS yang menurun terlalu jauh pada tahun 2019 mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Petani dengan kebun kecil sangat merasakan efek dari turunnya harga TBS. Ongkos panen yang begitu mahal untuk kebun dengan jarak angkut normal Rp 200-300 ribu sedangkan kebun yang memiliki jarak angkut yang jauh maka biaya panen bagi 2. Harga TBS yang kala itu Rp. 600 jika hasil panen petani hanya 1 ton maka total Rp 600 ribu dibagi 2 hanya Rp 300.000, harga yang tidak dapat

[69] Hasil wawancara dengan Disbun Nagan Raya

menutupi biaya perawatan kelapa sawit itu sendiri. Petani mengharapkan harga TBS kelapa sawit perkilonya tidak dibawah harga RP 1.000.

Keadaan seperti ini patut mendapatkan perhatian secara terfokus oleh pemerintah, setiap daerah selalu berusaha menjamin kemakmuran dari masyarakat yang ada di dalam wilayah kepengurusannya seperti masyarakat pesisir pantai diberikan kemudahan dengan bantuan alat-alat tangkap ikan sedangkan masyarakat yang bertani dibantu dengan pemberian alat-alat pertanian dan fasilitas pendukung lain seperti irigasi. Namun, untuk petani sawit peran yang lebih dibutuhkan ialah perlindungan terhadap harga meski terkadang harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar, tetapi upaya kecil yang dilakukan untuk dapat mempengaruhi harga merupakan hal yang besar bagi petani kelapa sawit.

> *Kekecewaan petani disaat harga dibawah Rp.1000. Harga seperti itu sangat bermasalah bagi keberlangsungan hidup Kami petani yang memiliki kebun sedikit apalagi ongkos panen yang cukup mahal karna medan kebun kami yang jauh pertonnya biaya panen bagi dua.*[70]*"*

Harga TBS yang menetapkan adalah distanbun. TBS dengan rendemen dibawah 17% adalah Rp.1.747 pada periode April 2021 sedangkan praktek dilapangan, PMKS rata-rata membeli TBS dengan harga 1.650 sehingga disurati oleh disbun Nagan Raya. Kemudian ketetapan harga distanbun periode November TBS dengan rendemen dibawah 17% yakni Rp 2.396 sedangkan harga rata-rata PMKS Nagan Raya Rp 2.545 terlihat lebih baik ketimbang periode dibulan April.[71]

[70]Wawancara dengan petani Nagan Raya
[71]Data harga dari Disbun Nagan Raya

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penyebab ketidakstabilan harga TBS di kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:
   a. Kualitas TBS yang kurang baik menjadi faktor penyebab harga TBS tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan Distanbun.
   b. Kemudian masalah transportasi dimana biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman CPO memakan biaya yang besar; dan
   c. Berjalannya pasar yang tidak sesuai dengan ketetapan harga yang dikeluarkan Distanbun.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk mempengaruhi ketidakstabilan harga TBS antara lain
   a. Melakukan revitalisasi tanaman kelapa sawit dengan umur diatas 25-30 tahun dan digantikan dengan bibit berkualitas.
   b. Membuat transportasi laut atau pelabuhan CPO untuk proses ekspor CPO di Kabupaten Nagan Raya secara langsung;
   c. Melakukan pemantauan terkait berjalannya pasar kelapa sawit dan memberikan surat teguran kepada PMKS yang tidak mengikuti ketetapan harga yang dikeluarkan Distanbun;

AR-RANIRY

5.2 SARAN

1. Untuk lebih memaksimalkan harga TBS di Kabupaten Nagan Raya. Perlu adanya pantauan khusus dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri agar harga TBS tetap stabil kemudian juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan cara budidaya kelapa sawit yang benar agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat.
2. Pemerintah harus mambuat kabijakan khusus terkait dengan harga TBS, dikarenakan TBS merupakan mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Angky Armanda. “Ekonomi Politik: Sengketa Aset Antara Yayasan Kas Pembangunan dengan Pemerintah Kota Surabaya” Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, hal: 396-411 403.2014.

Awan Y, Rusfiana, “Teori dan analisis kebijakan publik” Penerbit Alfabeta, 2016.

Adris,Susanti Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.6.

Budiyanto, Mudjiharjo, C.S. Identifikasi kerusakan buah sawit dan pengaruh penundaanpengolahan terhadap peningkatan kandungan ALB pada buah sawit. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*. 7(2): 133-139.2005.

Bogdan Taylor, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya)2006

Coelli TJ, Rao DSP., O’Donell CJ., BatteseGE. An Introduction toEfficiency and ProductivityAnalysis. *Second edition*. NewYork: Springer.2005

Diana Faudhiah.2019.Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis Dan Kepentingan Politik Di Nagan Raya.[Skripsi].Aceh (ID):UIN Ar-Raniry Banda Aceh https://aceh.tribunnews.com/2020/07/17/klarifikasi-harga-beli-tbs-disbun-nagan-raya-undang-11-pmks-ini-nama-nama-perusahaan-yang-hadir.

Gurning, dkk. 2007. Manajemen Bisnis Pelabuhan. PT Andhika Prastya Ekawahana.

Hakim.,2015.”Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”Iqtishadia,Vol 8.No.1

Hendria Irawan. Harga Sawit Nagan Raya Anjlok, DPRK Datangi Distanbun Aceh.https://www.indojayanews.com/daerah/harga-sawit-nagan-raya-anjlok-dprk-datangi-distanbun-aceh.2020

Hudori., M. Pengkuran Kinerja Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Sebagai Bahan Baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS). *Industrial Engineering Journal* Vol.7 (2): 1-7.2018

Husai, Ahmad dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*,Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Khalifah, Muhammad. Metode Penelitian Pendidikan Yogyakarta:Aynat Publishing. 2015.

Krisdiarti., A.,W, et all .2017. Optimasi Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Proses Panen-AngkutMenggunakan Model Dinamis. *Jurnal Agritech*. Vol. 37 (101)

Latifat LW, Ogbaji IE, Ocholi A. Technical and Allocative Efficiencyof Palm Oil Processing in BenueState. *Journal of SustainableDevelopment in Africa* Vol.15 (6):153. 2013.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:2007.gramedia

Muhammad Zardi, Meliyana m. Pemanfaatan Limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Ekspansif. Jurnal Teknik Sipil Unaya.Vol.3,No 1. 2017

Putri et al. (2018). Pengaruh perceived ease of use dan perceived usefulness terhadap kepuasan pengguna transaksi go-pay. Forum ilmiah pendidikan akuntansi progam studi pendidikan akuntansi-fkip universitas pgri madiun.

Rizwan. Bupati Berharap KEK-KIT Terwujud Di Nagan Raya. https://aceh.tribunnews.com. 2019

Sentot Imam Wahjono,Anna Marina, *Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia*,Puslit2 Petra,Vol.3. 2009.

Taufiqurokhman, Kebijakan Publik "Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan" Penerbit : Fisip Universitas Moestopo beragama.

Syamsul Ma'arif. "*Rent Seeking Behavior*" Dalam Relasi Birokrasi Dan Dunia Bisnis. Ide-Ide Untuk Pemantapan Jati Diri Ilmu Administrasi Negara.Vol.1,No 263-276. 2015.

Suranto. 2004. "Manajemen Operasional Angkatan Laut dan Pelabuhan Serta prosedur Impor Barang". Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tim Publikasi Kata Data. 10 Negara Denga Konsumsi Minyak Sawit Terbesar Dunia. http://databoks.katadata.ac.id. 2010

Uki yunita. *Ekonomi Politik "Rent Seeking"Dalam Jaringan Kepentingan Pertambangan Emas Di Jember* [Skripsi].Surabaya. (ID):Universitas Airlangga Surabaya. 2015.

Wibowo R. dkk..1999. Refleksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Nusantara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Adydaryanto. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi. Http://Adydaryanto.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Downloads/Files/59817/2.+Peran+Pemerintah+Dalam+Bidang+Ekonomi.Pdf.2018.

Aidil Firmansyah. Harga Turun,Petani Pawit Nagan Raya Demo PabrikKelapa Sawit. https://modusaceh.com/newa/harga-turun-petani-sawit-nagan-raya-demo-pabrik-kelapa-sawit/index/.html.2019.

UIN AR-RANIRY

Mujiburrahman. Harga Buah Sawit Turun, Petani Kelapa Sawit Demo Ke PKSNaganRaya. https://mediarealitas.com.cdn.ampproject.org/v/s/mediarealitas.com/2019/07/harga-turun-buah-petani-sawit-demo-ke-pks-nagan-raya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran

Hasil Wawancara Dengan DPRK Nagan Raya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja kebijakan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten nagan raya terkait persoalan TBS	Solusi untuk perkara untuk menyelesaikan persoalan TBS oleh DPRK dan pemerintah kabupaten Nagan Raya Pertama pembangunan pelabuhan CPO di wilayah Nagan Raya, Kedua melakukan pengkajian kembali mengenai transportasi TBS, hal tersebut dikarenakan musibah Covid-19. Ketiga memberikan bibit yang baik kepada petani untuk tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 25- 30 tahun.
2.	Bagaimana proses pengawasan harga TBS oleh DPRK Nagan Naya yang ditetapan distanbun Aceh	Pengawasan harga TBS itu lebih fokus oleh disbun karna sesuai dengan permentan dikabupaten dimandatkan kepada bupati dan bupati bisa memandatkan kepada disbun kata DPRK

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Hasil Wawancara Dengan Agen dan Petani

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa efek yang dirasakan disaat harga TBS naik turun di Nagan Raya	Sangat meresahkan disaat harga TBS kelapa sawit turun hingga 70%. Hal tersebut dikarenakan masyarakan Tripa mayoritas mengandalkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai mata pencarian yang utama , apabila harga TBS turun sangat signifikan sehingga sangat berdampak bagi perekonomian kami.
2.	Apakah menurut bapak/ibu perlu adanya peran pemerintah dalam mempengaruhi harga TBS?	Pemerintah kabupaten Nagan raya harus bersikap bijaksana dan tegas dalam mengambil dan menghadapi permasalahan turunya harga TBS kelapa sawit karena sawit merupakan pendapatan perekonomian utama bagi masyarakat di Nagan raya.
3.	Apakah bapak/ibu akan membawa TBSnya ke PMKS yang ada di Nagan Raya atau lebih memilih ke kabupaten tetangga yang harganya lebih tinggi?	Daerah Tripa Makmur tidak membawa Kelapa Sawit ke pabrik Nagan Raya, namun lebih memilih membawa kelapa sawit ke Aceh Barat, Aceh Jaya dan Bahkan ada juga yang membawa sawit ke kabupaten Subulussalam, hal tersebut dikarenakan harga TBS kelapa sawit disana mendapatkan keuntungan yang jauh lebik baik.
4.	Siapa yang paling dirugikan dalam permasalahan harga TBS ini?	Pentani Kelapa Sawit, hal tersebut dikarenakan mayoritas perekonominan masyarakat Tripa Makmur bertumpu pada panjualan dari Tandan Buah Segar/ kelapa sawit.

Hasil Wawancara Dengan PMKS

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja faktor yang mempengaruhi harga TBS tidak stabil antara Nagan Raya dan daerah lainnya?	Faktor yang paling krusial adalah rendeman dari hasil TBS yang juga berkualitas baik dari bibit yang berkualitas kematangan buah dan cara perawatan buah kelapa sawit itu sendiri karna kebanyakan sawit di Nagan Raya khususnya sawit milik masyarakat itu masih sangat banyak mengambil bibit dari pohon sawit yang sudah tua dan buahnya berat dan adakala juga mereka mengambil bibit jalang sehingga oleh hal ini mempengaruhi kualitas tanaman sawit. sawit dengan kualitas yang tidak terjamin hasil panennya juga lebih sedikit sementara jika menggunakan bibit tanaman kelapa sawit tenera itu hasil panennya dalam 1 hektare bisa mencapai 2 ton/sekali panen sedangkan sawit biasa dalam 1 hektare hanya berada pada kisaran 1,2 ton-1,5 ton/sekali panen jadi ini merupakan perbandingan yang sangat besar terkadang juga masyarakat petani sawit dalam memanen itu sering putaran panennya tidak tetap disaat kadang perlu uang buah sawitnya langsung dipanen sedangkan keadaan buah masih mengkal buah lolos sortasi tapi minyak atau rendemennya kurang baik jadi seperti itu.

		Untuk faktor yang lain itu adalah masalah jarak transportasi jadi selama ini kita CPO di nagan raya itu dikirim memutar melalui timur aceh karena jika menerobos langsung dari jalur barat selatan aceh itu medannya cukup berbahaya sehingga beresiko bagi mobil CPO dan juga resiko bagi perusahaan tentunya,oleh karena itu kita selalu harus menggunakan jalur timur aceh maka oleh karena itu perbedaan harga kita di Nagan Raya dengan daerah subulussalam atau sebagian wilayah disana lebih mahal.
2.	Apa saja peran yang dapat dilakukan pemerintah dalam membantu PMKS yang ada di Nagan Raya agar dapat membeli TBS lebih baik	untuk solusi yang dapat dihadirkan pemerintah disini menurut kita yang pertama itu pemda bisa melakukan self-Processing atau mengolah sendiri di dalam kabupaten Nagan Raya produk-produk dari CPO baik itu produk minyak makan ataupun sebagainya karena dengan pengolahan sendiri di dalam daerah akan memberikan dorongan harga yang lebih tinggi terhadap produk unggulan kita yaitu kelapa sawit.yang kedua disini dibangunnya storage tank atau tangki penyimpanan dimana biasanya tangki ini dibangun di dalam areal pelabuhan agar mobil CPO bisa langsung bongkar tidak harus menunggu kapan kapal datang dan yang terakhir ya pelabuhan itu sendiri karena ini solusi transportasi terbaik ketimbang harus menggunakan jalur darat yang begitu

		jauh
3.	Apakah ketapan harga TBS dari Distanbun sudah sesuai?	data yang di ambil oleh distanbun merupakan data rata-rata PMKS yang ada di Nagan Raya jadi berbeda-beda PKS penentuan indeks K-nya juga berbeda kalau misalkan PKS yang memiliki kebun luas sudah pasti rendemen mereka cukup karena dengan TBS kebun sendiri yang sudah pasti kualitas buahnya bagus walaupun bercampur dengan buah milik masyarakat. Tetapi sebagian PKS tidak memiliki hasil yang demikian sehingga ketetapan distanbun itu tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin namun selisihnya biasa tidak jauh karena kita juga coba mengimbangi palingan selisih Rp 100-200. kemudian kualitas TBS milik masyarakat yang ditanam digambut itu hasilnya berbeda lagi dengan yang ditanaman di tanah biasa dan jenis bibit sekali lagi paling menentukan seandainya masyarakat semua menanam tenera mungkin ketetapan harga dari distanbun itu sudah sangat tepat karena rendemen yang didapatkan sesuai.
4	Apakah ada teguran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada PMKS terkait ketidakstabilan harga TBS?	Teguran tentunya ada dimana kita ketahui pemerintah itu selalu bertindak disaat banyak keluhan dari masyarakat beberapa PMKS pernah disurati atau ditegur langsung oleh Disbun.

Wawancara Dengan Disbun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa upaya yang telah dilakukan Distanbun mengenai persoalan TBS di Nagan Raya?	untuk upaya yang dilakukan oleh disbun Nagan Raya yang pertama itu ialah rutin mengawasi praktek pembelian TBS yang dilakukan oleh PKS yang ada di Nagan Raya kemudian sosialisasi juga rutin dilakukan oleh Dinas Perkebunan Nagan Raya kepada PKS terkait dengan harga beli TBS. selanjutnya, Dinas Perkebunan Nagan Raya juga menghadiri rapat penentuan harga TBS yang dilakukan di tingkat provinsi setiap 1 bulan sekali agar kemudian dapat dipraktekkan di Nagan Raya sendiri sesuai dengan bunyi dalam permentan sendiri tentang pedoman penetapan harga TBS Dan monitoring terhadap praktek pembelian TBS yang dilakukan oleh PKS rutin dilakukan agar jika ada yang menyeleweng langsung diberi peringatan.
2	Bagaimana menjelaskan keadaan pasar kepada masyarakat terkait dengan simpang siur harga yang terjadi antara kabupaten Nagan Raya dengan kabupaten	Memang untuk menjelaskan kepada masyarakat agak sedikit susah dikarenakan tidak semua masyarakat itu bisa paham dengan apa yang kita jelaskan jadi komponen penentu harga TBS. Jika pertanyaannya kenapa perbedaan harga antara di Nagan Raya dan kabupaten lain itu berbeda misalkan dengan

	lainnya?	subulussalam yang mana memang lumayan besar perbedaannya itu disebabkan oleh jarak, yang mana CPO dari Nagan Raya itu dikirim melalu jalur timur sangat sedikit yang berani melintasi jalur barat selatan dikarenakan medan jalan yang begitu beresiko
3	Apa saja kendala yang diterima oleh Distanbun dari dampak kebijakan TBS tersebut?	Untuk kendala sendiri tidak ada dikarenakan selama ini disbun Nagan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja.pks yang selama ini melanggar kemudian ditegur baik secara langsung maupun disurati agar dapat mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan semuanya berjalan lancar tidak ada penolakan yang terjadi
4	Apakah perencanaan pembangunan pelabuhan cpo dan revitalisasi kelapa sawit merupakan upaya untuk dapat menstabilkan harga TBS di Nagan Raya.	Iya sebelumnya pemerintah Nagan Raya memang sudah merencanakan pembangunan pelabuhan CPO di Nagan Raya sendiri agar dapat meningkatkan perekonomian di Nagan Raya dan juga dapat menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat Nagan Raya,tentunya jika pelabuhan ini terwujud biaya transportasi yang semula melalu darat akan terpangkas karena sudah di alihkan melalui jalur laut.namun sampai sekarang rancangan tersebut masih dalam proses karena terjadi beberapa kendala di lapangan khususnya mengenai pembebasan lahan di daerah tripa makmur.revitalisasi juga merupakan langkah pemerintah untuk dapat menciptakan kelapa sawit yang berkualitas

		karena salah satu faktor penentu harga juga pada kualitas walaupun kita melihat di tabel harga yang ditetapkan distanbun itu umur sekian harga sekian namun pada intinya itu untuk menentukan rendemen dari CPO sendiri dengan kualitas bibit yang baik maka tidak ada alasan dari PKS untuk membeli TBS dibawah harga yang telah ditetapkan[72]

Wawancara Dengan Petani

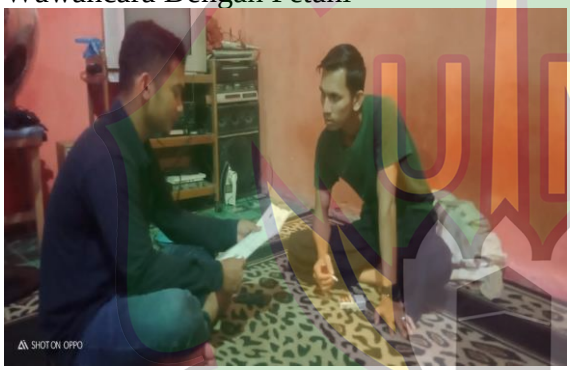

[72] Hasil wawancara dengan PMKS pada tanggal 24 November 2021.

Wawancara dengan PMKS

Wawancara dengan DPRK Nagan Raya

Wawancara dengan Disbun Nagan aya

Wawancara dengan agen sawit

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Biodata Pribadi

Deki Suriadi

**"Sukses berasal dari susah yang dijinakkan.
stay strong while breathing"**

DATA PRIBADI

- Nama : Deki Suriadi
- TTL : Krueng seumanyam 26 februari 1999
- JK : laki laki
- TB : 166
- BB : 63 kg
- Alamat : desa krueng seumanyam, kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

PENDIDIKAN

- SDN Krueng Seumanyam (2005-2011)
- SMPN 6 Darul Makmur (2011-2014)
- SMAN 5 Darul Makmur (2014-2017)

PENGALAMAN ORGANISASI

- .ketua osis smp 2013
- .Osis SMA 2015-2017
- kabid Advokasi HMP Ilmu Politik 2018-2019
- Kabid Advokasi DEMA FISIP 2019-2020
- sekjen Korwil 1 Himapol Indonesia 2019
- Ketua Ipelmasdam 2019

HOBI

- Diskusi
- Baca Buku
- Ngopi Inspiratif
- Menonton Film

AR-RANIRY